

ABSTRAK

ADINDA ASRIANI PUTRI SIREGAR: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung*

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan keadilan kepada subyek hukum sesuai dengan undang-undang. Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung. Berdasarkan rekapitulasi data yang diperoleh dari Pengadilan Militer II-09 Bandung tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019-2023 sebanyak 10 perkara yang diputus. Tindak Pidana Narkotika merupakan Tindak Pidana Khusus maka diatur diluar KUHP. Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak pengadilan militer dalam proses penegakan hukum dan akibat hukum yang diterapkan pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum pengadilan militer II-09 Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam teori ini menyebutkan lima aspek penting penegakan hukum yaitu substansi, penegak hukum, masyarakat, sarana fasilitas dan budaya. Sehingga pihak pengadilan perlu memperhatikan tiga aspek tersebut dalam menegakan keadilan. Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat diketahui terkait dengan indikator efektivitas penegakan hukum yang ada di Pengadilan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* dan pendekatan *juridis empiris* yang bersumber kepada Peraturan Perundang-Undangan yang relevan, serta berbagai sumber literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan observasi dan wawancara langsung serta data yang dianalisis mencakup jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, proses persidangan, dan putusan hakim di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Hasil penelitian ini dapat ditemukan beberapa kesimpulan. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan militer II-09 Bandung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun pada prosesnya terdapat beberapa kendala yaitu ; ketidakhadiran saksi dalam persidangan; kurangnya bukti otentik; alasan terdakwa dikarenakan sakit dan overdosis obat; Pemeriksaan urine tidak di hari yang sama membuat urine menguap dan terjadi kecurangan pada saat tes urine kembali; terdakwa melakukan tindakan eksternal untuk menghilangkan zat positif narkotika dengan minum air kelapa. Akibat hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Pengadilan Militer II-09 Bandung hanya sanksi retributif belum ada implementasi sanksi rehabilitasi. Sanksi yang ada berupa pidana penjara dan denda.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Narkotika, Militer